

ABSTRAK

Era globalisasi dan perkembangan transportasi tentu turut mempengaruhi perpindahan penduduk antar negara dengan mudah dan cepat. Warga Negara Asing yang memasuki suatu wilayah di luar negaranya harus turut mengikuti peraturan perundang-undangan dari suatu negara yang dimasukinya sebagai bentuk penghormatan kedaulatan negara tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap Warga Negara Asing yang dideportasi akibat terlibat Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan warga negara asing yang harus dideportasi akibat terlibat tindak pidana Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia dalam konstruksi hukum dan menurut perspektif hukum Islam.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa warga negara asing yang telah diusir atau dideportasi karena melakukan tindak pidana narkotika juga dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, terdapat kelemahan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Deportasi dilakukan berlaku untuk semua warga Negara Asing tanpa memandang sebagai pengedar ataupun pengguna. Penulis menilai terdapat ketidakadilan dan menyianyikan kesempatan terhadap warga Negara asing yang dilakukan Deportasi, seharusnya dengan melihat keuntungan atas keberadaan warga Negara asing tersebut untuk Bangsa dan Negara. Warga Negara asing yang memiliki kontribusi kepada Negara tidak perlu dengan hukuman tambahan berupa Deportasi. Sedangkan didalam perspektif hukum Islam tidak ada/tidak ditemukan terminologi narkotika. Hanya Narkotika disamakan dengan perbuatan *Khamr* saja. Sehingga disimpulkan bahwa status hukum narkotika disamakan dengan status hukum *khamr*.

Kata kunci : orang asing, tindak pidana, narkotika, deportasi

ABSTRACT

In the era of globalization and the development of transportation, of course, it also affects the movement of people between countries easily and quickly. Foreign citizens who enter an area outside their country must also follow the laws and regulations of the country they enter as a form of respect for the sovereignty of that country. In this study the author will raise the perpetrators of Narcotics Crimes committed by foreigners in Indonesia which is regulated in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. Analysis of how the law is applied to foreign citizens involved in Narcotics Crimes by not abandoning the ideals of a nation that is just Pancasila, especially for perpetrators who are only users and have other benefits for the Indonesian nation such as foreign teaching staff, special experts, or workers needed by workers. and thoughts by our nation.nThe approach of this research is normative juridical using descriptive analysis through the theory of legal protection and the theory of justice of Pancasila.nForeign citizens who have been expelled or deported for committing narcotics crimes are also prohibited from re-entering the territory of the Republic of Indonesia, there are weaknesses in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely Deportation is carried out applies to all foreign nationals regardless of being a dealer or user. The author considers that there is injustice and wasted opportunities for foreign nationals who are deported, it should be by looking at the benefits of the existence of these foreign nationals for the Nation and State. Foreign nationals who have contributed to the country do not need an additional penalty in the form of deportation. Meanwhile, in the perspective of Islamic law, there is no drug terminology. Only Narcotics are equated with the actions of Khamr. So it can be concluded that the legal status of narcotics is equated with the legal status of khamr.

Keywords : Foreigners, Crime, Narcotics, Deportation

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية